

**PENGARUH DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL DAN PERTUMBUHAN
EKONOMI TERHADAP KEMISKINAN DI KABUPATEN/KOTA
PROVINSI SUMATERA SELATAN**



Skripsi Oleh:

JOHANNES GERRY SITINJAK

(01021381520103)

EKONOMI PEMBANGUNAN

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

2018

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF
PENGARUH DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL DAN
PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP KEMISKINAN DI
KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA SELATAN

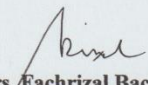
Di susun oleh :

Nama : Johannes Gerry Sitingjak
Nim : 01021381520103
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian : Ekonomi Keuangan Daerah

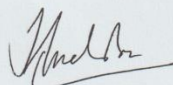
TANGGAL PERSETUJUAN

DOSEN PEMBIMBING

Tanggal


Ketua : Drs. Fachrizal Bachri, M. Sc
NIP. 195710201984031002

Tanggal


Anggota : Imelda, S.E., M.S.E
NIP. 197703092009122002

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI
PENGARUH DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL DAN PERTUMBUHAN
EKONOMI TERHADAP KEMISKINAN DI KABUPATEN/KOTA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Di susun oleh :

Nama : Johannes Gerry Sitinjak
Nim : 01021381520103
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian/Konsentrasi : Ekonomi Keuangan Daerah

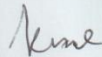
Telah di uji dalam ujian Komprehensif pada tanggal 31 Desember 2018 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Palembang, 31 Desember 2018

Ketua

Anggota

Anggota



Drs. Fachrizal Bachri, M. Sc
NIP. 195710201984031002



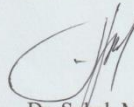
Imelda, S.E., M.S.E
NIP. 197703092009122002



Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si
NIP. 196007101987031003

Mengetahui

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan



Dr. Suhel, M.Si.
NIP. 196610141992031003

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Disusun oleh:

Nama : Johannes Gerry Sitinjak

NIM : 01021381520103

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Ekonomi Pembangunan

Bidang Kajian : Ekonomi Keuangan Daerah

Fakultas : Ekonomi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan”

Pembimbing :

Ketua : Drs. Fachrizal Bachri, M.Sc

Anggota : Imelda, S.E., M.S.E

Tanggal diuji : 31 Desember 2018

Adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikialah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan saya ini tidak benar dikemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaaan.

Palembang, Januari 2019
Pembuat Pernyataan

Johannes Gerry Sitinjak

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karna atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian Skripsi ini yang berjudul ***“Pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan”***. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini membahas mengenai pengaruh beberapa komponen variabel yaitu derajat desentralisasi fiskal, pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa adanya hubungan yang positif dan signifikan antara variabel independen derajat desentralisasi fiskal terhadap variabel dependent kemiskinan, dan adanya hubungan negatif dan signifikan antara variabel independen derajat desentralisasi fiskal terhadap variabel dependent kemiskinan. Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai kendala. Kendala tersebut dapat diatasi berkat bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak.

Palembang, Januari 2019

Johannes Gerry Sitinjak

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat, dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ***“Pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan”*** salah satu syarat dalam mendapat gelar sarjana ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai kendala. Kendala tersebut dapat teratasi berkat bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis ingi menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Drs. Fachrizal Bachri, M.Sc dan Ibu Imelda, S.E., M.S.E selaku dosen pembimbing yang telah mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwah, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Suhel, S.E., M.Si dan Bapak Dr. Imam Asngari, S.E., M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si selaku penguji yang telah memberikan kritik maupun saran kepada saya sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan.

5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen yang telah mendidik saya selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
6. Orang tuaku dan keluargaku yang selama ini telah membantu peneliti dalam bentuk perhatian, semangat, serta doa yang tidak henti-hentinya mengalir demi kelancaran dan kesuksesan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman Ekonomi Pembangunan Angkatan 2015.

Palembang, Januari 2019

Johannes Gerry Sitinjak

ABSTRAK
PENGARUH DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL DAN PERTUMBUHAN
EKONOMI TERHADAP KEMISKINAN DI KABUPATEN/KOTA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Oleh :

Johannes Gerry Sitinjak; Fachrizal Bachri; Imelda

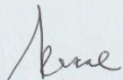
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh derajat desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan periode 2008-2017. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Pusat (BPS) Provinsi Sumatera Selatan. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan model terpilih yaitu *Fixed Effect Model (FEM)*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa derajat desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama memberikan pengaruh signifikan terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan, dan secara individu derajat desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan serta pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Koefisien determinasi sebesar 0.775764, yang berarti bahwa variasi variabel kemiskinan sebesar 77.57 persen dapat dijelaskan oleh derajat desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi.

Kata kunci: *Derajat Desentralisasi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan*


Telah disetujui untuk ditempatkan pada lembar abstrak.

Ketua

Anggota


Drs. Fachrizal Bachri, M.Sc


Nip. 195710201984031002


Imelda, S.E., M.S.E

Nip.197703092009122002

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan


Dr. Suhel, M.Si.

NIP. 196610141992031003

ABSTRACK

THE EFFECT OF DEGREE OF FISCAL DECENTRALIZATION AND ECONOMIC GROWTH ON POVERTY IN THE DISTRICTS/CITIES OF SOUTH SUMATERA PROVINCE

By:

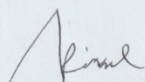
Johannes Gerry Sitinjak; Fachrizal Bachri; Imelda

This study aims to determine the effect of the degree of fiscal decentralization and economic growth on poverty in the districts / cities of South Sumatra Province for the period 2008-2017. The data used in this study are secondary data obtained from the Central Statistics Agency (BPS) of South Sumatra Province. The analysis technique used is panel data regression with the selected model namely Fixed Effect Model (FEM). The results of this study indicate that the degree of fiscal decentralization and economic growth together have a significant influence on poverty in the districts / cities of South Sumatra Province, and individually the degree of fiscal decentralization has a positive and significant effect on poverty and economic growth has a negative and significant effect on poverty. The determination coefficient is 0.775764, which means that the variable variation in poverty by 77.57 percent can be explained by the degree of fiscal decentralization and economic growth.

Keywords: Degree of Fiscal Decentralizations, Economic Growth, Poverty

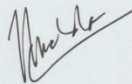
First Advisor

Member



Drs. Fachrizal Bachri, M.Sc

Nip. 195710201984031002



Imelda, S.E., M.S.E

Nip.197703092009122002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
	Nama : Johannes Gerry Sitinjak
	Nim : 01021381520103
	Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 10 September 1997
	Alamat : Jl. Serasi III Perum. Villa Serasi Blok C No. 23 Km. 13
	Handphone : 089635117563
AGAMA	: Kristen
JENIS KELAMIN	: Laki-laki
STATUS	: Belum Menikah
KEWARGANEGARAAN	: Indonesia
TINGGI	: 168 cm
BERAT BADAN	: 52 kg
KEGEMARAN	: Berkumpul bersama keluarga dan teman
EMAIL	: joger1009@gmail.com
PENDIDIKAN	
2004-2009	SD Methodist 1 Palembang
2009-2012	SMP Negeri 3 Palembang
2012-2015	SMA Negeri 3 Palembang
2015-2018	Fakultas Ekonomi, Jurusan Ekonomi Pembangunan, Universitas Sriwijaya

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACK	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakag	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Landasan Teori.....	8
2.1.1 Kemiskinan	8
2.1.1.1 Definisi Kemiskinan.....	8
2.1.1.2 Pengukuran Kemiskinan Absolut.....	10
2.1.1.3 Penyebab Kemiskinan.....	11

2.1.2	Pertumbuhan Ekonomi.....	12
2.1.2.1	Definisi dan Pengukuran Pertumbuhan Ekonomi.....	12
2.1.3	Teori Pertumbuhan Ekonomi.....	13
2.1.3.1	Teori Pertumbuhan Ekonomi Kuznet.....	21
2.1.4	Kebijakan Fiskal.....	23
2.1.4.1	Definisi dan Konsep Kebijakan Fiskal.....	23
2.1.5	Desentralisasi Fiskal.....	25
2.1.5.1	Tujuan Desentralisasi Fiskal.....	27
2.1.6	Derajat Desentralisasi Fiskal.....	28
2.1.7	Hubungan Desentralisasi Fiskal dan Kemiskinan.....	29
2.1.8	Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan.....	30
2.2	Penelitian Terdahulu.....	32
2.3	Kerangka Pikir.....	36
2.4	Hipotesis.....	37
BAB III METODE PENELITIAN		38
3.1	Ruang Lingkup Penelitian.....	38
3.2	Jenis Data dan Sumber Data.....	38
3.3	Metode Pengumpulan Data.....	39
3.4	Teknik Analisis Data.....	39
3.5	Analisis Regresi Data Panel.....	40
3.5.1	Model Regresi Data Panel.....	41
3.5.1.1	<i>Common Effect</i>	41
3.5.1.2	<i>Fixed Effect</i>	41
3.5.1.3	<i>Random Effect</i>	42
3.5.2	Pemilihan Teknik Estimasi.....	42
3.6	Pengujian Statistik.....	44
3.6.1	Uji Signifikan Simultan (Uji F).....	44
3.6.2	Uji Signifikan Individual (Uji T).....	46
3.6.3	Koefisien Determinasi (R^2).....	48
3.7	Definisi Operasional Variabel.....	48
BAB IV PEMBAHASAN.....		47
4.1	Gambaran Umum Sumatera Selatan.....	50
4.1.1	Luas dan Batasan Wilayah Administrasi.....	50
4.1.2	Letak Kondisi Geografis.....	52
4.1.3	Gambaran Umum Variabel Penelitian.....	52

4.1.3.1 Perkembangan Derajat Desentralisasi Fiskal	52
4.1.3.2 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi	55
4.1.3.3 Perkembangan Kemiskinan.....	58
4.2 Hasil Estimasi Variabel Independen Terhadap Variabel Dependen	60
4.2.1 Pemilihan Model Yang Baik	61
4.2.2 Analisis Individu	65
4.2.3 Uji Statistik	66
4.2.3.1 Uji Signifikan Simultan (Uji F)	66
4.2.3.2 Uji Signifikan Individual (Uji t).....	66
4.2.3.3 Koefisien Determinasi (R^2).....	67
4.2.4 Interpretasi Hasil dan Pembahasan	67
4.2.4.1 Pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal Terhadap Kemiskinan	67
4.2.4.2 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan	69
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	71
5.1 Kesimpulan	71
5.2 Saran.....	71
5.3 Keterbatasan	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN.....	78

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persentase Penduduk Miskin Di Provinsi Sumatera Selatan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2016-2017	2
Tabel 2.1 Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal	29
Tabel 4.1 Luas Wilayah, Kecamatan, dan Kelurahan di Provinsi Sumatera Selatan.....	51
Tabel 4.2 Perkembangan Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten/Kota.....	53
Tabel 4.3 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota.....	57
Tabel 4.4 Perkembangan Kemiskinan Kabupaten/Kota	59
Tabel 4.5 Hasil Menggunakan Metode <i>Common Effect, Fixed Effect, Random Effect</i>	61
Tabel 4.6 Hasil Regresi Menggunakan Uji Chow	61
Tabel 4.7 Hasil Regresi Menggunakan Uji Hausman	62
Tabel 4.8 Hasil Regresi Model <i>Fixed Effect</i>	63
Tabel 4.9 Nilai Intersep Setiap Individu	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Grafik dalam Teori Harrod-Domar	14
Gambar 2.2 Model Dua Sektor Lewis	15
Gambar 2.3 Akumulasi Modal dan Pertumbuhan Ekonomi	19
Gambar 2.4 Pertumbuhan Ekonomi dan keadaan “ <i>Steady State</i> ”	19
Gambar 2.5 Perkembangan Teknologi dan Pertumbuhan Ekonomi	20
Gambar 2.6 Peningkatan Tabungan dan Pertumbuhan Ekonomi	21
Gambar 2.7 Kurva U Terbalik Kuznet	22
Gambar 2.8 Kerangka Pikir	36
Gambar 3.1 Uji F	45
Gambar 3.2 Uji Hipotesis Dua Pihak	48
Gambar 4.1 Peta Provinsi Sumatera Selatan	50
Gambar 4.2 Rata-rata Derajat Desentralisasi Fiskal 2008-2017	54
Gambar 4.3 Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Selatan 2008-2017	56
Gambar 4.4 Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota 2008-2017	57

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota	73
Lampiran 2 Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Kabupaten/Kota	74
Lampiran 3 Total Pengeluaran Daerah Kabupaten/Kota	75
Lampiran 4 Produk Domestik Regional Bruto Harga Konstan Kabuapten/Kota	76
Lampiran 5 <i>Common Effect Model</i>	77
Lampiran 6 <i>Fixed Effect Model</i>	78
Lampiran 7 <i>Random Effect Model</i>	79
Lampiran 8 Uji Chow.....	80
Lampiran 9 Uji Hausman	81

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan permasalahan yang klasik dan mendasar bagi sebagian besar negara yang sedang berkembang termasuk di Indonesia. Kemiskinan bukan hanya semata-mata mempersoalkan kurangnya pendapatan dan kepemilikan harta, akan tetapi lebih luas dari pada itu. Kemiskinan adalah masalah rendahnya kualitas sumber daya manusia; kemiskinan adalah masalah sandang, pangan dan papan; kemiskinan adalah masalah lapangan kerja; dan kemiskinan adalah masalah ketidakpastian masa depan, singkatnya kemiskinan adalah masalah serba kekurangan (Nanga, 2006).

Upaya penanggulangan untuk mencegah dampak yang lebih luas diakibatkan permasalahan kemiskinan ini seperti dampak sosial yang dapat menimbulkan tingkat kejahatan yang terus meningkat karena orang berusaha mencari cara untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan rasa aman bagi masyarakat pun terganggu dan pada akhirnya akan menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Kemiskinan dapat mengakibatkan kualitas pembangunan manusia yang rendah karena ketidakmampuan masyarakat yang tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan pokoknya (Musa, 2014).

Permasalahan dan dampak dari kemiskinan ini menjadi pusat perhatian utama sebagai sasaran pembangunan nasional yaitu menurunkan tingkat kemiskinan yang sudah menjadi salah satu penyakit dalam perekonomian. Di Sumatera Selatan sendiri, kemiskinan masih dianggap sebagai persoalan yang serius, terlihat pada tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 1.1. Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Selatan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2016-2017

Kabupaten/Kota	2016	2017
Ogan Komering Ulu	13.29	12.95
Ogan Komering Ilir	16.03	15.75
Muara Enim	13.56	13.19
Lahat	17.11	16.81
Musi Rawas	14.30	14.24
Musi Banyuasin	17.27	16.75
Banyuasin	11.72	11.47
OKU Selatan	10.95	10.98
Oku Timur	11.29	11.00
Ogan Ilir	13.80	13.58
Empat Lawang	12.54	12.44
Palembang	12.04	11.40
Prabumulih	11.44	11.42
Pagar Alam	9.19	8.89
Lubuk Linggau	13.99	13.12
Sumatera Selatan	13.54	13.19

Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan (data diolah, 2016-2017)

Kabupaten Lahat dan Musi Banyuasin menjadi kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi di antara 15 kabupaten/kota lainnya, yaitu pada 2016 kemiskinan kemiskinan Kabupaten Lahat sebesar 17.11% dan Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 17.27%. Kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan terendah di

antara kabupaten/kota lainnya adalah kota Pagar Alam dengan tingkat kemiskinan sebesar 9.19% di 2016 dan 8.89% di 2017 dengan jumlah penduduk 136,605 jiwa. Kota Palembang dengan jumlah penduduk terbanyak pada kabupaten/kota di Sumatera Selatan memiliki tingkat kemiskinan sebesar 12.04% tahun 2016 dan 11.40% tahun 2017.

Kabupaten OKU Selatan menjadi satu-satunya daerah yang mengalami peningkatan kemiskinan, yaitu sebesar 0.03%. Tingkat kemiskinan OKU Selatan tahun 2016 sebesar 10.95% menjadi 10.98% di 2017. Sedangkan 14 kabupaten/kota lainnya mengalami penurunan tingkat kemiskinan. Kota Lubuk Linggau menjadi daerah yang mengalami penurunan terbesar tingkat kemiskinan yaitu sebesar 0.87%, dari tingkat kemiskinan sebesar 13.99% pada tahun 2016 menjadi 13.12% di 2017.

Dilihat dari masih cukup besarnya jumlah penduduk miskin tersebut, menjadikan permasalahan ini sebagai persoalan yang serius dan karenanya diperlukan upaya-upaya pemecahan yang lebih serius pula. Peran pemerintah sebagai pembuat keputusan diharapkan dapat hadir sebagai jawaban atas permasalahan tersebut, setiap pemerintah mempunyai cara tersendiri dengan mengeluarkan berbagai kebijakan dan program tersendiri seperti program beras untuk keluarga miskin (RASKIN), program bantuan operasional sekolah (BOS), dan program jaminan kesehatan masyarakat (JAMKESMAS).

Pada dasarnya suatu pemerintahan memiliki tujuan utama yaitu meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyatnya. Fokus utama pemerintah dalam mencapai tujuan tersebut adalah meningkatkan perekonomian yang diukur dengan besarnya pendapatan daerah (Sasana, 2009). Semakin besar pendapatan daerah maka pemerintah memiliki dana yang besar untuk membiayai kegiatan pembangunan dan meningkatkan layanan kepada masyarakat. Keadaan perekonomian juga sering menjadi titik acuan dalam menilai kinerja pemerintah yang berkuasa di jamannya. Dengan demikian perekonomian merupakan hal yang sangat penting bagi keberlangsungan suatu pemerintahan.

Perubahan sistem pemerintahan dari terpusat (sentralisasi) menjadi desentralisasi pada tanggal 1 Januari 2001 memungkinkan pemerintah lebih optimal dalam mengelola potensi dan kekhasan yang dimiliki daerah, pada sistem sentralisasi kekuasaan sepenuhnya dipegang pemerintah pusat dalam hal ini daerah kabupaten/kota tinggal melaksanakannya saja.

Program-program pembangunan daerah yang dibuat pemerintah pusat harus diterima oleh pemerintah daerah walaupun tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat daerah sehingga akan menyebabkan ketidakefisienan kebijakan, serta menyebabkan kurang terlihatnya peran dari pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah. Untuk dapat melihat apakah kabupaten/kota bisa melaksanakan otonomi dengan baik dapat dilihat dari besarnya derajat desentralisasi fiskal (DDF), yaitu

dengan menggunakan variabel pokok kemampuan keuangan daerahnya (Muryawan & Sukarsa, 2016).

Kebijakan desentralisasi fiskal bertujuan untuk memampukan keuangan daerah dan memberikan kewenangan bagi daerah untuk mengelola segala potensi keuangan daerah secara optimal. Melalui pemberian kewenangan penerimaan dan kewenangan pengeluaran yang nantinya akan memberikan dampak positif jika di alokasikan secara tepat, dengan demikian pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan pengentasan kemiskinan di daerah tersebut.

Menurut (Sudewi & Wirathi, 2013) bahwa desentralisasi fiskal akan memberikan dampak positif terhadap pengurangan jumlah penduduk miskin bila diikuti dengan adanya kenaikan pada pendapatan perkapita. Desentralisasi fiskal tidak hanya dapat mengetahui masalah kemiskinan tetapi dapat menjadi pendorong untuk prospek pertumbuhan ekonomi di daerah otonomi.

Pertumbuhan ekonomi adalah bagian penting dari pembangunan sebuah negara, bahkan bisa dikatakan sebagai salah satu indikator penting untuk menjelaskan bahwa suatu negara itu mampu secara finansial atau sejahtera, dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat di masing-masing provinsi mengindikasikan bahwa pemerintah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan (Sunusi, Kumenaung, & Rotinsulu, 2014).

Menurut (Manek & Badruddin, 2016) pertumbuhan ekonomi daerah tercermin melalui pertumbuhan PDRB. Berdasarkan data yang di peroleh melalui Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan, laju pertumbuhan PDRB Provinsi Sumatera Selatan selama 5 periode terakhir mulai mengalami penurunan pada 2013 sebesar 5.62% dan terus mengalami penurunan selama dua tahun berikutnya, pada tahun 2015 laju pertumbuhan PDRB Provinsi Sumatera Selatan mengalami penurunan drastis menjadi 0.05% dan menjadikan tahun 2015 sebagai laju pertumbuhan PDRB terendah selama penelitian tahun 2008-2017

Setelah mengalami penurunan laju pertumbuhan PDRB yang drastis pada tahun 2015 Provinsi Sumatera Selatan terus berbenah sehingga pada tahun 2016 laju pertumbuhan PDRB menjadi 4.88% artinya laju pertumbuhan PDRB meningkat sebesar 4.83%. Akhir periode laju pertumbuhan PDRB pun mengalami peningkatan menjadi 5.40%, perubahan peningkatan tersebut tentu tak lepas lepas dari kontribusi laju pertumbuhan PDRB masing-masing kabupaten/kota di Sumatera Selatan.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana pengaruh derajat desentralisasi fiskal, dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan.

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pengaruh derajat desentralisasi fiskal, dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Sebagai tambahan informasi kepada pembaca dan masyarakat mengenai desentralisasi fiskal, derajat desentralisasi fiskal, pertumbuhan ekonomi, dan kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dapat memberikan informasi serta masukan kepada pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan.

Daftar Pustaka

- Abimanyu, *et al.* 2009. Era Baru Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep, dan Implementasi, Jakarta: Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan.
- Adi, P. H. 2005. Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi.. *Jurnal Interdisipliner Kritis UKSW*, 1–20.
- Agrawal, P. 2008. Economic growth and poverty reduction: evidence from Kazakhstan. *Asian Development Review*, 24(2), hal. 90–115.
- Amalia, F. R., & dan Purbadharmaja, I. B. P. 2014. Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah dan Keserasian Alokasi Belanja Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal EP Unud*, 3 (6), hal. 257-264.
- Ani, N. L. N. P., & Dwirandra, A. A. N. B. 2014. Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Pada Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 6(3), hal. 481-497.
- Arsyad, L. 2004. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi Keempat. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Asra, A. 2008. Poverty and inequality in Indonesia: Estimates, decomposition and key issues. *Journal of the Asia Pacific Economy*, 5(1/2), hal. 91–111.
- Astuti, W. 2015. Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Pengangguran dan Kemiskinan. *Jurnal EBBANK*, 6(1), hal. 1–18.
- Aulia, N. 2014. Hubungan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, dan Kesenjangan Pendapatan Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah. *Economics Development Analysis Journal*, 3 (2).
- Bahl, Roy W., 2000. China : Evaluating the impact of Intergovernmental Fiscal reform dalam Fiscal Decentralization in Developing Countries. Edited by Richard M. Bird and Francois Vaillancourt, United Kingdom : Cambridge University Press.
- Bashir, A. 2011. Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Perekonomian Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Kajian Ekonomi*.
- Dewi, P. A. K., & Sutrisna, I. K. 2014. Pengaruh kemandirian keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 4(1), hal. 32–40.

- Ebel, Robert D and Seidar Yilmaz. 2002. Concept of Fiscal Decentralization and World Wide Overview. World Bank Institute. www.worldbank.org.
- Elhiraika, A. 2007. Fiscal Decentralization and Public Service Delivery in South Africa. *Economic Commission for Africa*.
- Ghozali, I. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ginting, A. M., & Rasbin. 2010. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Sebelum dan Setelah Krisis. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 1(2), hal. 279-311.
- Gujarati, D. N., & Porter D. C. 2012. *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Salemba Empat, Jakarta.
- Hasan, R., & Quibria, M. G. 2002. Poverty and Patterns of Growth. *Asian Development Bank*, 18(1), hal. 1-25.
- Hutabarat, E., & Sriyono, D. 2016. Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Peneluaran Pemerintah, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan. *Jurnal Ilmu Ekonomi*.
- Jhingan, M. L. 2000. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Jonaidi, A. 2012. Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi*, 1(1).
- Kee, W. K. 2015. Fiscal Decentralization and Economic Development. *Public Finance Quarterly*, 5(1), hal. 79-97.
- Kwon, O. 2003. The Effects of Fiscal Decentralization on Public Spending: The Korean Case. *Public Budgeting & Finance*, 23(4), hal. 1–20.
- Mahi, R. 2001. Prospek Desentralisasi di Indonesia Ditinjau dari Segi Pemerataan Antar daerah dan Peningkatan Efisiensi. *Penelitian CSIS XXIX*, , Indonesia Project, Jakarta.
- Manek, M., & Badruddin, R. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Telaah Bisnis*, 17(2), hal. 81-98.
- Mursinto, D. 2004, Derajat Desentralisasi Fiskal dan Tingkat Kemandirian Keuangan Pada Era Otonomi Daerah Pemerintahan Kabupaten dan Kota di Provinsi

- Jawa Timur. *Disertasi*. Program Pascasarjana Universitas Airlangga. Surabaya (tidak dipublikasikan).
- Muryawan, S. M., & Sukarsa, M. 2016. Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Fiscal Stress, dan Kinerja Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 5(2), hal. 229–252.
- Musa, A. J. 2014. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Provinsi-Provinsi Di Indonesia. *Skripsi*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro Semarang.
- Mustika, C. 2011. Pengaruh PDB dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan di Indonesia Periode 1990-2008. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 1(4), hal. 12–23.
- Nanga, M. 2006. Dampak Transfer Fiskal Terhadap Kemiskinan Di Indonesia : Suatu Analisis Simulasi Kebijakan. *Disertasi*. Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor.
- Nangarumba, M. 2016. Analisis Pengaruh Kebijakan Moneter, Kebijakan Fiskal, Dan Penyaluran Kredit Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2006-2016. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 8(2).
- Rao, M. G. 2000. Poverty Alleviation under Fiscal Decentralization. *World Development Report*, 2(4) 1–23.
- Republik Indonesia. 2004. UU No. 32. Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah. *Departemen Komunikasi dan Informatika*. Jakarta.
- Saputra, B., & Mahmudi. 2012. Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. *Jaai*, 16(2), hal. 185–199.
- Sasana, H. 2009. Peran Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 10(1), hal. 103–124.
- Sasana, H. 2015. Dampak Implementasi Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Stabilitas Harga Di Provinsi Di Indonesia. *Media Ekonomi dan Manajemen*, 30(1)
- Sepulveda, C. F., & Vazquez, J. M. 2011. The Consequences of Fiscal Decentralization on Poverty and Income Equality. *Environment and Planning C: Government and Policy*, 29(10), hal. 321-343.

- Sidik, M. 2004. Indonesia's Imbalance Decentralization and Its Future Direction for A Greater Taxing Power to Sub-National Governments. Dalam Subiyantoro dan Rihpat (Eds) Kebijakan Fiskal : Pemikiran, Konsep, dan Implementasi. Edisi Revisi. Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Siregar, H., & Wahyuniarti, D. 2007. Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin. *Jurnal Economics Development*, 1-28.
- Skira, M. 2006. Fiscal Decentralization and Poverty. Available:<http://www.ayps.edu>.
- Sudewi, N. N. A., & Wirathi, I.G.A.P. 2013. Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan Propinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 2(3), 135–141.
- Sukirno, S. 2000. *Makroekonomi Modern*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suliswanto, M. S. W. 2010. Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8(2), hal. 354–366.
- Sunusi, D. K., Kumenaung, A., & Rotinsulu, D. 2014. Analisis Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah pada Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya terhadap Kemiskinan di Sulawesi Utara tahun 2001-2010. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 14(2), 120–137.
- Suryahadi, A., *et al.* 2009. The effects of location and sectoral components of economic growth on poverty: Evidence from Indonesia. *Journal of Development Economics*, 89(1), hal. 109–117.
- Swandewi, A. A. I. A. Pengaruh Dana Perimbangan dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Keserasian Anggaran dan Kesejahteraan Masyarakat Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 3(7), hal. 356-376.
- Tambunan, T. H. 2001. *Perekonomian Indonesia*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. 2004. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Edisi Kedelapan*. Erlangga, Jakarta.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. 2011. *Ekonomi Pembangunan*. Erlangga, Jakarta.
- Wahyuni, S. 2009. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Dalam Mendukung Pelaksanaan Daerah. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta.

- Waluyo, J. 2007. Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antara Daerah di Indonesia Di Indonesia.
- Widiastuti, A. 2010. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Jawa Tengah. *Skripsi*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro Semarang.
- Wijayanto, R. D. 2010. Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Jawa Tengah. *Skripsi*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro Semarang.
- World Bank. 2004. *Mainstreaming Anticorruption Activities in World Bank Assistance: A Review of Progress Since 1997*. Washington, DC: World Bank.
- Woyanti, N. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan UMP Terhadap Kemiskinan Di Jawa Tengah Pra dan Pasca Desentralisasi Fiskal. *Media Ekonomi dan Manajemen*, 28(2), 1-16.
- Zhang, T., & Zou, H. 1998, Fiscal Decentralization, Public Spending and Economic Growth in China, *Journal of Public Economics* 67(2), 221-240.
- Zulyanto, A. 2010. Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Propinsi Bengkulu. *Tesis*. Program Study Magister Ilmu Ekonomi dan Study Pembangunan, Universitas Diponegoro.